



Revitalisasi Peran dan budaya Akademik PTKI dalam mewujudkan Alumni Pelopor Pendidikan Islam Multikultural

by Muhaemin Muhaemin

IAIN PALOPO

Submission date: 17-Apr-2020 11:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 1299788613

File name: makalah_AICIS_2014_muhaemin_STAIN_Palopo.docx (52.51K)

Word count: 4471

Character count: 31418

Revitalisasi Peran dan Budaya Akademik PTKI dalam Mewujudkan Alumni Pelopor Pendidikan Islam Multikultural

oleh: Muhaemin (STAIN Palopo)

Abstrak:

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Sebagai lembaga ilmiah, PTKI telah berperan sebagai pusat pembinaan generasi muda yang memiliki pemahaman Islam yang inklusif. Pemahaman ini mendorong untuk menerima perbedaan, menjauhi prasangka dan mengedepankan toleransi. Kontribusi PTKI melahirkan alumni pelopor pendidikan Islam multikultural akan dicapai dengan melakukan beberapa hal; pertama: sosialisasi wawasan multikulturalisme dan ruanglingkup pendidikan multikultural setiap civitas akademik secara masif dan terstruktur. Kedua, melakukan pemetaan terhadap tantangan pengembangan pendidikan Islam yang sedang dialami dan menyusun rencana aksi dengan melihat potensi dan kompetensi yang dimiliki. Ketiga: PTKI harus tetap terdepan dalam menyediakan layanan yang bermutu tapi terjangkau, bebas diskriminasi serta memberikan ruang bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus.

A. Pendahuluan

Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia ditandai dengan keragaman. Keragaman tidak hanya pada nomenklatur, tetapi juga pada tingkat yang lebih substansial seperti kurikulum, referensi, rujukan dan model pembelajaran yang diterapkan.¹

Pendidikan Islam di Indonesia telah memiliki lembaga yang cukup lengkap mulai jenjang dasar hingga Perguruan Tinggi.² Selain madrasah, pesantren, *meunasah*, *dayah*, *rangkang*, dan surau, lembaga pendidikan Islam yang telah berperan dalam dinamika pendidikan di Indonesia adalah Perguruan Tinggi Islam (PTI) yang dalam istilah terakhir disebut dengan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).³

¹Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20*, (Jakarta, Kencana, 2012), h. iv.

²Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h 128.

³PMA RI nomor 15 tahun 2014

Data yang dipublikasikan Direktorat Pendidikan Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat 53 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dengan jumlah mahasiswa 13.841 orang. Selain itu terdapat pula 619 Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan jumlah mahasiswa 329.351 orang.⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa peran PTKI cukup signifikan khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan Tinggi.

Perguruan Tinggi sebagai salah satu elemen dalam Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visi Indonesia 2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dalam kancah internasional, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mampu memberikan tawaran solusi terhadap berbagai masalah kemanusiaan dan kebangsaan.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia adalah negara yang terdiri dari suku, agama dan budaya yang beragam. Dalam konteks keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia, maka salah satu aspek yang aktual untuk dibicarakan adalah kontribusi kajian Islam dalam dinamika masyarakat yang multikultural.

Kajian mengenai kerukunan umat beragama menjadi penting karena akhir-akhir ini merebak sentimen-sentimen keagamaan, baik di Indonesia maupun di belahan bumi lainnya seperti India antar kaum Sikh, Hindu, dan Islam; dinegara bekas Yugoslavia antara Muslim-Bosnia dengan Kristen-Serbia, di Filipina Selatan antara kelompok Islam Moro dengan kelompok Kristen, serta kerusuhan-kerusuhan di Libanon. Pantas dicermati bahwa pertentangan antar agama muncul tidak selalu disebabkan oleh sentimen agama, tetapi sering dipicu oleh kepentingan politik-ekonomi dimana agama sering dijadikan “sumbu” untuk menyulut, sehingga seolah-olah hal tersebut merupakan konflik agama.⁵

⁴Kamaruddin Amin, “Inovasi Pendidikan Islam”, Majalah Pendidikan Islam PENDIS, Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag RI Edisi No.1/Desember/I/2013, h.73. Data yang ditampilkan bersumber dari Buku Statistik Pendidikan Islam, Februari 2013

⁵ TH. Sumartana, *Dialog, Kritik, Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian Interfide, t.th), h. 222-223

Nasir Abdulaziz al-Nasser dari perwakilan PBB menegaskan bahwa dalam situasi dunia yang tengah menghadapi meluasnya kekerasan karena perbedaan, masyarakat global diajak mewujudkan gagasan toleransi secara nyata. Untuk itu perlu mengembangkan pendidikan lintas agama dan kultural.⁶ Hal ini akan mendorong pemahaman lebih baik antarindividu yang berasal dari kultur atau latarbelakang berbeda.

Di Indonesia, pemicu kerusuhan yang dikaitkan dengan isu-isu sentimen keagamaan cukup tinggi, seperti kasus Poso, Maluku, dan di tempat-tempat lain. Kita tidak bisa menutup mata, meski faktor sosial, politik, dan ekonomi cukup mewarnai, namun agama juga tidak bisa ditampik perannya dalam konflik sosial. Hal ini terutama terkait dengan sikap kurang toleran terhadap pemeluk agama lain, meski didalam ajaran agama dianjurkan untuk bersikap toleran. Dalam menyiarkan ajarannya, pemeluk agama sering berupaya menyakinkan manusia bahwa agamanya yang paling benar dan agama yang lain salah, bahkan harus disingkirkan. Hal ini merupakan sikap tertutup yang cenderung ekstrim.⁷

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai lembaga pendidikan tinggi yang diakui eksistensinya dalam Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tanggungjawab dalam mendukung terciptanya harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini selaras dengan visi Kementerian Agama yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.⁸

Peran PTKI di atas sejalan dengan *“World Declaration on Higher Education for the Twenty First Century: Vision and Action”* yang dikeluarkan oleh UNESCO. Isi deklarasi tersebut relevan dengan paradigma baru Perguruan Tinggi di Indonesia. Salah satu isi deklarasi tersebut menyebutkan bahwa misi dan fungsi Perguruan Tinggi adalah membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan, dan menyebarkan budaya-budaya

⁶ Dewan Redaksi, “Toleransi harus diwujudkan” Pendidikan Lintas agama dan Kultural diperlukan di Tingkat dasar dan Menengah, Kompas, Minggu, 31 Agustus 201, h. 15

⁷ TB. Simatupang, *Peranan Agama-Agama Dalam Negara Pancasila*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, t.th), h. 131

⁸ Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010

historis nasional, regional dan internasional dalam pluralisme dan keragaman budaya.⁹

Tulisan ini akan menguraikan beberapa hal, pertama: peran PTKI dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Kedua, pendidikan Islam dan ruanglingkup pendidikan multikultural. Ketiga, optimalisasi kontribusi PTKI melalui budaya akademik yang berwawasan multikultural.

B. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Masyarakat Indonesia yang Multikultural

Merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural.

Pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia dalam perjalanannya selalu dihadapkan kepada berbagai tantangan dan dinamika. Hal ini disebabkan karena pendidikan adalah kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Keadaannya selalu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan corak, sifat dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tersebut.¹⁰

Atas keragaman masyarakat itulah, Qurais Shihab berpendapat bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau di ekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Ia harus timbul dalam masyarakat itu sendiri. Ia adalah pakaian yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya berdasarkan identitas, pandangan hidup serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.¹¹

Keberadaan Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan suatu masyarakat. Proses perubahan sosial (*social change*) di masyarakat yang begitu cepat, menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan tinggi itu benar-benar terwujud dalam peran yang nyata.

⁹Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed.), *Problem dan Prospek IAIN Ontologi Pendidikan Tinggi Islam*, (Jakarta: Ditbinperta Depag RI, 2000), h. 421-422 , h. 7

¹⁰Ali Khalil Abu al-Ainain, *Falsafah al-Tarbiyah al - Islamiyah, fi al-Quran al – Karim*, (t.t : Dar a;-Fikr al-Araby, 1980), cet I, hal. 37

¹¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1992), hal. 175.

Pada umumnya peran Perguruan Tinggi itu diharapkan tertuang dalam pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi, yaitu : dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa fungsi Pendidikan Tinggi salahsatunya adalah mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma.¹²

Dengan dharma pendidikan, Perguruan Tinggi diharapkan melakukan peran pencerdasan masyarakat dan transmisi budaya. Dengan dharma penelitian, Perguruan Tinggi diharapkan melakukan temuan-temuan baru ilmu pengetahuan dan inovasi kebudayaan. Dengan dharma pengabdian pada masyarakat, Perguruan Tinggi diharapkan melakukan pelayanan masyarakat untuk ikut mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Melalui dharma pengabdian pada masyarakat ini, Perguruan Tinggi juga akan memperoleh *feedback* dari masyarakat tentang tingkat kemajuan dan relevansi ilmu yang dikembangkan Perguruan Tinggi itu.

Khusus dalam bidang kehidupan keagamaan, terdapat sejumlah kecendrungan perubahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian kalangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, diantaranya:¹³

- 1) Pembangunan khususnya kota-kota yang telah membawa perkembangan dan dinamika yang heterogen, komposisi penduduk semakin beragam karena semakin bertambahnya para pendatang baik dari daerah-daerah dipedalaman. Apabila mereka itu kurang mampu beradaptasi dengan tradisi dan budaya setempat, sehingga keragaman ini jika tidak mampu dikelola dengan baik maka pada waktunya akan berkembang kearah yang tidak menguntungkan. Ini harus didekati dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Masalah ekonomi masyarakat, khususnya yang terkait dengan pergeseran-pergeseran hak pemilikan tanah, baik antara penduduk setempat maupun antara penduduk setempat dan pendatang, dapat mengarah kepada keresahan masyarakat apabila pergeseran hak kepemilikan itu atau pemanfaatan tanah itu kemudian ditenggarai berkaitan dengan simbol-

¹² UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 4.

¹³Dewan Redaksi, Swara Ditperta: No. 11 Th. II, 17 Juli 2004, (Jakarta: Ditbinperta Depag RI, 2004), h. 2004

simbol kelompok sosial, budaya, atau agama tertentu. Ini tentu perlu dikelola dengan baik dan juga harus didekati melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 3) Tradisi atau kearifan local (*local wisdom*) yang secara turun temurun mentradisi dalam kehidupan. Dalam kehidupan masyarakat yang telah berfungsi dengan baik dalam membangun harmonis sosial perlu terus dikaji, diinventarisir, dianalisis hubungannya dengan nilai ajaran agama, dan disosialisasikan. Konsep-konsep seperti “*kayuh baimbai*” (kerjasama), “*gawisabumi* (gotong-royong), *basusun sirih* (kesetaraan), menyisir sisi tapih (introspeksi), rumah betang (kasih sayang dan persaudaraan), *handep* atau *habaring hurung* (gotong-royong), juga harus didekati dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 4) Forum-forum komunikasi antar umat beragama yang merupakan bentuk kearifan lokal hasil kesepakatan zaman ini, juga perlu didekati Tri dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Masalah kemiskinan akibat semakin kurangnya lahan hutan dan pertanian, dan perpindahan tenaga kerja tidak terampil dari desa ke kota sehingga menambah angka pengangguran dikota, serta bagaimana mekanisme yang ada dalam masyarakat mengatasi masalah-masalah itu, adalah juga hal yang perlu didekati dengan Tri dharma Perguruan Tinggi. Apalagi karena hal tersebut sebagian besar menyangkut warga masyarakat beragama Islam.
- 6) Masalah kebodohan dan keterbelakangan yang masih melilit sebagian masyarakat, baik karena pandangan dikotomis ilmu agama dan umum, maupun karena keterpencilan geografis atau kemiskinan, serta mekanisme sosial yang ada mengatasi hal itu, perlu didekati dengan Tridharma Perguruan Tinggi.¹⁴

PTKI sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, jelas mempunyai kontribusi terhadap model keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Studi Islam yang dikembangkan di PTKI tidak hanya mendukung model keberagamaan inklusif di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, lebih dari itu juga menciptakan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Teologi inklusif

¹⁴M. Atho Muzdhar, “*Perubahan Sosial di Bidang Keagamaan*”, Materi Kuliah Umum di IAIN Antasari Banjarmasin 2006

dirintis perkembangannya oleh Harun Nasution dengan membuka mata kuliah teologi Islam yang bercorak non mazhab dan bersemangat toleran. Konsep ini selanjutnya dimatangkan oleh Nurcholis Madjid dalam berbagai tulisan dan ceramahnya. Sedangkan konsep kerukunan antarumat beragama, seperti disebutkan, dirintis perkembangannya oleh A. Mukti Ali, baik semasa menjadi Menteri Agama maupun ketika mengajar di IAIN Yogyakarta. Sementara itu tentang sumbangan Muslim Indonesia tentang wacana Islamisasi ilmu pengetahuan juga tampak. Muslim Abdurrahman dengan konsepnya Islam transformatif mencoba menggagas penerjemahan nilai normatif Islam ke dalam sebuah ideologi transformasi. Kuntowijoyo dengan konsep ilmu sosial propetik adalah sebuah ide yang penting dalam proses pencarian konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang sesuai dengan proses perkembangan sejarah maupun budaya. Di bidang lain, munculnya pemikir Islam semisal Quraish Shihab, Azyumardi Azra, dan Jalaluddin Rahmat, untuk menyebut beberapa orang, mengindikasikan keterlibatan muslim Indonesia dengan wacana keislaman terlebih dengan wacana global dunia.

Beberapa intelektual muslim yang disebutkan, tidak hanya mempunyai kaitan dengan PTKI, sebagian besar mereka adalah alumni PTKI. Dalam konteks inilah optimisme Fazlur Rahman merupakan harapan yang didasarkan pada realitas kehidupan keberagamaan di negeri ini. Namun harus segera dikatakan bahwa optimisme itu hanya tinggal optimisme jika tidak terdapat dukungan dari berbagai kalangan, baik kalangan intelektual maupun lembaga pendidikan, untuk mewujudkannya. Khusus UIN, IAIN/STAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam berstatus negeri jelas sangat strategis dalam turut serta mewujudkan optimisme tersebut. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kualitas UIN/IAIN/STAIN akan menentukan corak perkembangan Islam Indonesia di masa depan.

Mewujudkan Islam Indonesia yang ramah dan damai, alumni PTKI tidak hanya harus memiliki dasar pengetahuan (*basic competency*) dalam bidang agama guna memenuhi harapan yang bersifat sosial. Lebih dari itu juga harus memiliki

kualifikasi sebagai insan akademis. Disini tamatan PTKI dituntut memiliki wawasan teoritis dan keterampilan yang dibutuhkan dalam era globalisasi.¹⁵

Data-data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa jaringan kelembagaan PTKI mempunyai kekuatan dalam membangun harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Kekuatan itu diperkuat dengan jaringan alumni PTKI yang telah berkiprah pada berbagai bidang khususnya di bidang sosial keagamaan. Dengan konsep tri dharma Perguruan Tinggi yang diembannya, PTKI telah memberikan konsep dan aksi nyata dalam pembinaan kehidupan beragama di Indonesia. Mahasiswa PTKI yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah semakin membuktikan bahwa jaringan PTKI tidak hanya bekerja pada level “elit” tetapi juga menyentuh level “akar rumput” yang membutuhkan pencerahan dan pemahaman keagamaan yang terbuka dan toleran.

C. Pendidikan Islam dan ruang lingkup Pendidikan Multikultural

Kegiatan pendidikan di Indonesia dituntut untuk memiliki kepekaan menghadapi arus perputaran globalisasi. Pola doktrinasi monokulturalisme yang dipaksakan selama orde baru perlu dievaluasi, karena telah berimplikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multicultural.¹⁶

Menurut Azyumardi Azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan ini, jika tidak terkendali akan

¹⁵Husni Rahim, “IAIN dan Masa Depan Islam di Indonesia”, h. 421-423

¹⁶Akhmad Hidayatullah Al Arifin, *Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Praksis Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, UNY, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012

dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.¹⁷

Kamaruddin Amin menegaskan bahwa terdapat sejumlah peristiwa konflik sosial yang berlatar belakang etnis dan agama yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan besar pendidikan Islam untuk mewujudkan kerukunan dan kohesi sosial dan saling menghormati, masih sangat besar. Pendidikan Islam diharapkan menjadi perekat sosial dalam masyarakat.¹⁸

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai salahsatu lembaga ilmiah dituntut untuk merespon tantangan tersebut. PTKI dituntut untuk memberikan layanan akademik yang baik dan bebas diskriminasi sehingga pengelola PTKI seharusnya memiliki wawasan multikultural yang holistik sekaligus pelopor pendidikan Islam multikultural.

Pendidikan Islam multikultural dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan; berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; serta mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.¹⁹

Mudjia Rahardja menjelaskan, sebagai suatu faham, multikulturalisme diharapkan dapat menjadi perekat antar berbagai kelompok etnis dan budaya. Hajatnya pun jelas, agar terjadi harmoni dan integrasi sosial.²⁰

James Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan:

- *Content integration*

Adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang didalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka.

¹⁷Lihat Azyumardi Azra, "Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Bhineka Tunggal Ika", dalam Majalah Tsaqafah: Mengagas Pendidikan Multikultural, Vol. I No:2, IKA UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.

¹⁸ Kamaruddin Amin, *Quo Vadis Pendidikan Islam*, Majalah Pendidikan Islam PENDIS, Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag RI Edisi No.1/Desember/I/2013, h.2

¹⁹ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)*, 19.

²⁰Mudjia Rahardja, *Tantangan Pendidikan Islam di Era Multikultural*, Orasi ilmiah dibacakan dalam Rapat Terbuka Senat Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, Sumenep dalam rangka Wisuda XII Sarjana (S1), tanggal 22 Februari 2010.

adalah menghapus prasangkamengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.

-The Knowledge Construction Process

konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif tentang keragaman. Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)

-An Equity Paedagogy

Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial. pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap komponen yang beragam.

-Prejudice Reduction

Pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antar keragaman dalam kultur pendidikan.

-empowering school culture

Pemberdayaan budaya sekolah/budaya akademik. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.²¹

Multikulturalisme secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950-an di Kanada. Menurut Longer Oxford Dictionary istilah “multiculturalism” merupakan deviasi dari kata “multicultural” Kamus ini mengutip kalimat dari surat kabar Kanada, Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat “multicultural dan multi-lingual”.²²

Sedangkan wacana tentang pendidikan multikultural, secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefenisikan sebagai “pendidikan untuk/tentang

²¹James A. Banks. “Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice” dalam James A. Banks dan Cherry A. McGee, *Handbook of Research on Multicultural Education*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2001), h. 3-24. Nita E. Woolfolk, *Educational Psychology: Seventh Edition*, (The Ohio State University, 1998), h. 165-166

²²DEPAG RI dan IRD, Majalah Inovasi Kurikulum: *Kurikulum Berbasis Multikulturalisme*, Edisi IV, Tahun 2003, h. 14

keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”.

Istilah “pendidikan multikultural” dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: *pertama*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. *Kedua*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. *Ketiga*, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. *Keempat* pendidikan dwi-budaya. *Kelima*, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.²³

Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai *counter* terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.

Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam sebenarnya tidak membedakan etnik, ras dan lain sebagainya dalam pendidikan. Manusia semuanya adalah sama, yang membedakannya adalah ketakwaan mereka kepada Allah Swt. Dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan

²³DEPAG RI dan IRD, *Majalah: Inovasi Kurikulum: Kurikulum Berbasis Multikulturalism*, Edisi IV, Tahun 2003

bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu.

D. Membangun budaya Akademik PTKI yang berwawasan Multikultural

Kultur multikultural memerlukan proses belajar dan sosialisasi yang terus menerus. Apa yang perlu dikembangkan adalah kultur untuk menjadi proactive problem solver, mencari kebenaran dengan membuka jawaban terhadap masalah, memahami bahwa nilai tidak selalu hitam-putih, bahwa kepercayaan (trust) adalah nilai yang amat penting dalam kehidupan yang beragam, bahwa informasi untuk mengambil keputusan harus mengalir tanpa hambatan melalui berbagai macam keterhubungan dalam suatu jaringan kerja.

Dilihat dari manajemen sistem pendidikan, perlu dicatat, bahwa diperlukan *guideline* untuk para pengambil kebijaksanaan tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan yang bermuatan multikultural. Namun yang lebih penting adalah praktek manajemen itu sendiri. Respek terhadap budaya etnik, terhadap putra daerah lain, terhadap kreativitas guru dan murid, mengembangkan dialog dalam memecahkan konflik, tidak mengandalkan orientasi komando dalam manajemen, adalah beberapa contoh bagaimana manajemen pendidikan seharusnya dilaksanakan.²⁴

Menurut Malik Fadjar, pendidikan harus dikelola menurut manajemen modern dan futuristik sebagai usaha yang mengantarkan peserta didik ke posisi-posisi tertentu di masa depan. Yaitu, suatu manajemen yang berpretensi membangun manusia profesional-intelektual dan skilled dalam hal bagaimana mereka mampu bergaul di tengah-tengah komunitas global secara dinamis, kreatif dan inovatif.²⁵

Dalam konteks kekinian, maka PTKI harus merespon tantangan yang ada dan menerapkan paradigma baru sesuai kebutuhan masyarakat. Dewasa ini, paradigma baru pendidikan tinggi pada dasarnya bertumpu kepada tiga pilar

²⁴Sutjipto, Konsep Pendidikan Formal dengan Muatan Budaya Multikultural Jurnal Pendidikan Penabur - No.04/ Th.IV/ Juli 2005, h.6

²⁵Ahmad Barizi (ed), *Holistika Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar*, (Jakarta: Rajawali-UIN Malang Press, 2005), Cet. I, h. ix

utama, yakni kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi, akuntabilitas (*accountability*) dan jaminan mutu (*quality assurance*).²⁶

Seiring dengan tantangan globalisasi, pendidikan Islam harus memiliki karakter sehingga mampu menunjukkan prospek dan perannya di masa depan. Karakter tersebut antara lain: **Dinamik**, dalam arti terus bergerak maju dan siap membuat perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan tantangan yang dihadapi, dan tujuan yang ingin dicapai, yang harus kreatif dan visioner. **Relevan**, semua program-programnya diorientasikan pada kepentingan kemas-lahatan umat, sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakatnya, dan mendukung kebutuhan pembangunan nasionalnya. **Profesional**, dalam menangani manajemen institusinya, dalam memilih dan mengembangkan SDM-nya, dalam melaksanakan proses belajar-mengajarnya, dalam menggunakan metodologi dan teknologi pendidikannya, dan dalam upaya meningkatkan mutu out putnya. **Kompetitif**, siap bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lain di sekitarnya atau dimana saja, dalam penampilan, dalam pelayanan, dalam kualitas akademik dan dalam menarik dukungan dan partisipasi masyarakat.²⁷

Sejumlah PTIK telah menjadi pelopor pendidikan Islam multikultural. Adanya sejumlah tokoh seperti A. Mukti Ali, Harun Nasution, Malik Fadjar, Amin Abdullah, dan Azyumardy Azra telah menjadi penggerak budaya akademik berwawasan multikultural. Selain sebagai cendekiawan mereka juga memegang pernah memegang posisi sebagai rektor yang memiliki otoritas untuk menerjemahkan ide-ide yang mereka gulirkan di berbagai forum ilmiah.

Sebagai contoh, hasil riset menunjukkan UIN Sunan Kalijaga, secara kelembagaan, menjadi model perwujudan semangat multikultur dengan adanya berbagai lembaga atau pusat studi, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, yang mendialogkan Islam dengan berbagai realita sosial budaya dan berbagai isu lokal, nasional, regional maupun global yang berkembang. Secara akademik IAIN Antasari menjadi model pembelajaran bagaimana mendialogkan Islam dengan realita sosial budaya yang ada serta apresiasi positif lembaga

²⁶Fasli Jalal (ed), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Jakarta: Depdiknas-Adicita Karya, 2001), Cet. 1, h. 366.

²⁷ Pidato Pengukuhan KH M Tholhah Hasan Sebagai Guru Besar Unisma Malang 19/03/2007

pendidikan Islam terhadap budaya lokal. Sementara itu, dalam program pengabdian kepada masyarakat, STAIN Surakarta menjadi terdepan dalam penerapan model “KKN transformatif” yang menerapkan PAR dan PRA sebagai ikhtiar memberdayakan masyarakat.²⁸

Hasil kajian Ahmad Rais juga menjelaskan bahwa di era multikultural seperti sekarang, pendidikan sudah seharusnya menjadi media dalam membentuk sikap-sikap yang positif terhadap realitas sosial yang beragam. Sikap tersebut berawal dari pemahaman untuk menerima, mengakui dan menghargai orang lain dengan berbagai latar belakang yang ada. Karena orang lain, apapun aliran dan agamanya, adalah umat Tuhan yang memiliki hak yang sama untuk hidup di bumi Tuhan. Penanaman sikap dan nilai-nilai inklusif inilah yang nantinya menjadi daya tawar utama dalam sistem pendidikan multikultural, terutama dalam pendidikan Islam.

Pemikiran Amin Abdullah dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, cukup menonjol mulai dari gagasan integratif-interkonektif yang kemudian diaplikasikannya dalam pengembangan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga dan Pendidikan Islam Multikulturalnya ikut memberi sumbangan wacana yang signifikan dalam menciptakan konsep-konsep pendidikan Islam yang toleran, demokratis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan keadilan.²⁹

Posisi dosen sangat strategis dalam mewujudkan budaya akademik di PTKI sehingga dosen haruslah memiliki pandangan yang holistik dan memahami nilai-nilai multikulturalisme. Selain itu, setiap dosen diharapkan memahami visi misi kehadiran PTKI antara lain;

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu, teknologi, seni dan atau kebudayaan yang bernafaskan Islam.

²⁸Agus Moh. Najib, dkk, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam (Studi terhadap UIN Yogyakarta, IAIN Banjarmasin, dan STAIN Surakarta)*,

²⁹Ibid, h. 268

2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam dan atau kebudayaan Islam untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.
3. Merumuskan, menyebarluaskan dan mendidikkan filosofi dan nilai-nilai agama Islam sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai parameter perilaku kehidupan, menjadi inspirator dan katalisator pembangunan, serta motivator terciptanya toleransi kehidupan beragama, serta kehidupan yang harmonis antar umat yang berbeda agama.

Visi misi di atas sejalan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa salahsatu tujuan Pendidikan Tinggi adalah berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Setiap pendidik di PTKI juga harus memahami latarbelakang peserta didik/mahasiswa dengan baik. Dalam aktifitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (obyek) dan sekaligus sebagai subyek pendidikan. Oleh sebab itu dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik memiliki lima ciri yaitu;

1. Peserta didik dalam keadaan sedang berdaya, maksudnya ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.
2. Mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa.
3. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda.
4. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individu.³⁰

Menurut Tilaar, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari

³⁰ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), cet I, hlm 60

kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.³¹

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau *mainstream*. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.³²

Dalam implementasi budaya akademik berwawasan multikultural, beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh dosen di PTKI adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengembangkan dimensi Qur’ani yang tidak membatasi Islam hanya pada hal-hal yang bersifat ubudiyah-ritual saja. Berkaitan dengan hal itu, maka agama tidak lagi dipandang sebagai *something to use but not to life*, tetapi agama harus dipahami dan dijelaskan sebagai *unfying factor* (faktor pemandu bagi kehidupan manusia) dan *driving integrating motive* (pengendali setiap kehendak yang dimiliki manusia).
2. Memahami dan mengembangkan dimensi sosial Islam untuk menanggulangi masalah kepentingan pribadi yang saling bertentangan dan untuk membangun solidaritas sosial yang tinggi.
3. Mengubah pola pembelajaran agama yang monoton dan membosankan sehingga formalisme keagamaan yang kering dapat diakhiri.

³¹H. A. R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 497

³² Ibid

4. Mengakhiri mentalitas isolatif dan membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak lain dari kalangan manapun dalam semangat persaudaraan.³³

Pembenahan budaya akademik di PTKI juga perlu dilakukan dengan pemetaan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam selama beberapa tahun terakhir. Pemetaan tersebut dapat menjadi panduan dalam menentukan fokus program untuk memaksimalkan kontribusi PTKI dalam memecahkan masalah kebangsaan, kemanusiaan termasuk menjadi perekat dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.

Menurut Azyumardi, ada beberapa fenomena yang menyebabkan pendidikan Islam selalu berada dalam lingkaran tersingkirkan. *Pertama*, pendidikan Islam sering terlambat untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat, sekarang dan masa datang. *Kedua*, sistem pendidikan Islam kebanyakan masih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi dan matematika modern. *Ketiga*, usaha pembaruan dan peningkatan sistem pendidikan islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh yang hanya dilakukan sekenanya atau seingatnya, sehingga tidak terjadi perubahan secara esensial di dalamnya. *Keempat*, sistem pendidikan Islam tetap cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan atau kurang bersifat future oriented. *Kelima*, sebahagian besar pendidikan Islam belum dikelola secara profesional baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan yang lainnya.³⁴

Sedangkan Abdurahman Mas'ud mengemukakan bahwa kelemahan pendidikan Islam secara umum adalah; (1) Dunia pendidikan Islam kini terjangkau

³³Tanwir Y. Mukawi, "Fenomena Sempalan di PTU: Sebuah Tantangan Bagi Pendidikan Agama Islam", dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Basri (ed), *Dinamika pemikiran di Perguruan Tinggi Wacana tentang Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 245-246

³⁴Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 59-60

penyakit sindrom dikotomik, dan masalah spirit of inquiry,³⁵ (2) kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam dan lebih berorientasi pada konsep “Abdullah” daripada “*khalifatullah*” dan “*Hablum min Allah*” daripada “*Hablum min an-Nas*”. (3) adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai persoalan metodologis, bahkan sampai ke *tradition of learning*.³⁶

Dalam realitasnya, potensi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam, baik yang berbentuk madrasah dan sekolah maupun pendidikan tinggi nampak belum menjadi kekuatan aktual. Karena itu, menurut Malik Fadjar, perlu dilakukan pembenahan dan pengembangan melalui dua pendekatan, yaitu *Microscopis* (tinjauan mikro) dan *Macroscopic* (tujuan makro). Dalam pendekatan yang pertama, pendidikan dianalisis dalam hubungannya dengan kerangka social yang lebih luas. Sedangkan dalam pendekatan yang kedua, pendidikan dianalisis sebagai satu kekuatan unit yang hidup dimana terdapat saling interaksi di dalam dirinya.³⁷

Malik Fadjar menegaskan bila ingin menatap masa depan serta peran pendidikan Islam yang lebih artikulatif di masa datang, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian di dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh yang berkaitan dengan: *pertama*, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah-langkah operasionalnya, *kedua*, pemberdayaan (*empowering*) kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. *Ketiga*, perbaikan, pembaruan dan pengembangan dalam sistem

IAIN PALOPO

³⁵Menurut Usman Abu Bakar, *spirit of inquiry*, adalah hilangnya semangat membaca dan meneliti yang dulu menjadi supremasi utama dunia Pendidikan Islam pada zaman klasik dan pertengahan. Usman Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap Undang-Undang SISDIKNAS*, (Yogyakarta, Safiria Insani Pres, 2005), Cet. I, h. 3

³⁶Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik: Humanismen Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 14

³⁷ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, h. 237

pengelolaan dan manajemennya. *Keempat*, peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan.³⁸

Budaya akademik adalah milik khas Perguruan Tinggi. Otonomi keilmuan, mimbar akademik, suasana akademik di PTKI haruslah menjadi perhatian selain pembangunan yang bersifat fisik. Tradisi akademik dibangun dengan penuh kebersamaan, menjauhi prasangka, memberikan peluang yang sama tanpa melihat latar belakang kelompok atau golongan.

E. Penutup

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa catatan akhir sebagai berikut:

1. Pendidikan Islam dengan beragam lembaga yang dimilikinya, khususnya PTKI telah memberikan kontribusi dalam pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia melalui pembinaan mahasiswa/alumni PTKI yang memiliki wawasan keislaman yang inklusif, damai dan ramah.
2. Terdapat beberapa persamaan antara nilai-nilai pendidikan Islam dan pendidikan multikultural. Pendidikan Islam mendorong masyarakat untuk memperoleh kesempatan belajar tanpa diskriminasi, menjauhi prasangka serta proses pendidikan yang adil. Nilai tersebut menjadi inti dalam pendidikan multikultural karena pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan
3. Budaya akademik selama ini mendapatkan perhatian yang tidak seimbang dengan pembangunan fisik oleh para pengelola PTKI. Oleh karena itu diperlukan pemetaan tantangan PTKI khususnya dalam membangun budaya akademik yang berbasis multikultural. Upaya yang paling penting adalah orientasi bagi para pendidik/dosen agar memiliki wawasan multikultural sebagai proses membimbing para pendidik untuk melihat potensi dan keragaman peserta didik secara tepat dan proporsional.

³⁸ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, h. 237



Nama : Dr. Muhaemin, MA.

NIP : 19790203 200501 1 006

NIDN : 2002037901

Tempat/Tgl Lahir : Camming, (Bone - Sulawesi Selatan), 03 Februari 1979

Pendidikan Terakhir : S3 Pendidikan Islam SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
(2010)

Tempat Tugas : STAIN Palopo Sulawesi Selatan

Keahlian/Jabatan : Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Ilmu Pendidikan Islam

Email : emin.elmahady@gmail.com/elmahady79@yahoo.com

Blog: <http://muhaeminelmahady.wordpress.com>

Nomor Ponsel : 081342077397

3 Publikasi Terakhir

- Biaya Pendidikan (*education costs*) dalam sejarah Pendidikan di Indonesia, dalam Jurnal al-Tarbiyah STAI al-Gazali Bone, edisi Juli 2014
- Sasaran Pendidikan dalam Perspektif al-Quran, dalam Jurnal Ulul Albab STAIN Palopo, edisi Januari 2013
- Pendidikan Holistik dan Ilmu Pendidikan Islam, dalam Buku Pendidikan Holistik Pendekatan Lintas Perspektif, Penerbit Kencana Jakarta, 2012



IAIN PALOPO

Revitalisasi Peran dan budaya Akademik PTKI dalam mewujudkan Alumni Pelopor Pendidikan Islam Multikultural

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Submitted to Universitas Islam Riau

Student Paper

Exclude quotes

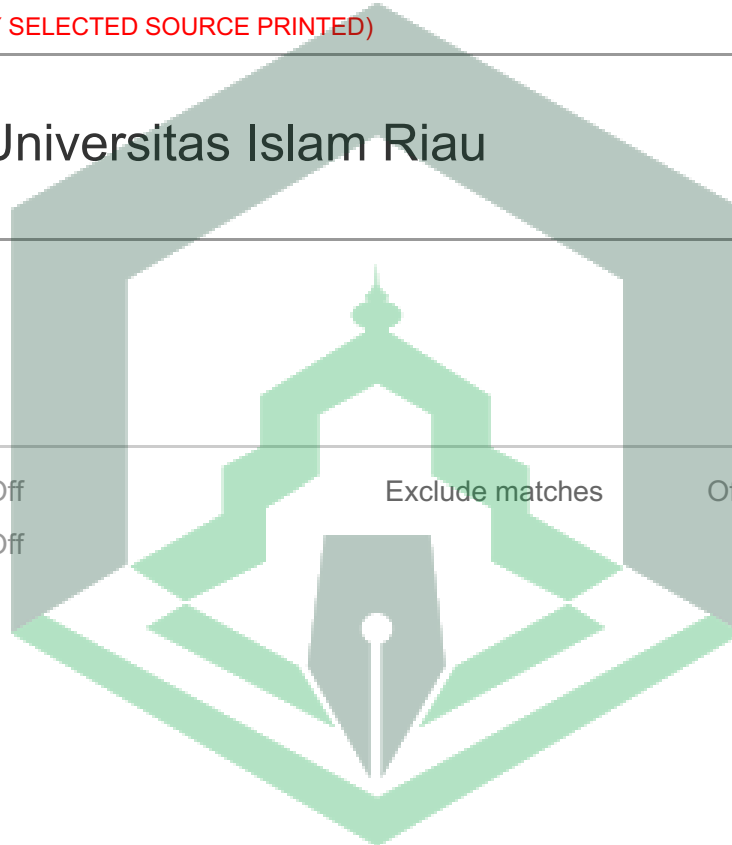
Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off



IAIN PALOPO